

SINERGITAS ULAMA DAN UMARA (Artikulasi dalam Penyelesaian Kasus Sara tentang Pemasangan Lafaz Allah pada Ornamen Pohon Natal di Hotel Novita Jambi)

Bahrul Ulum

Fak. Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp Sei Durian Kab.Muaro Jambi, 36363 |
irul70@yahoo.com

Abstract: This article aims to elaborate on the response to the process of resolving the blasphemy case that occurred in one of the hotels in Jambi. There was found the installation of Allah's label on the floor of the Christmas tree ornaments. Based on studies in the field, it was found that this case included ethnicity, race, religion and class nuance cases (SARA) and it had to be resolved immediately, because it could potentially lead to religious conflict and mass amok. The results of the study show that Firstly, the Government (leader) along with its ranks and Ulama (clerics) together with Islamic Organizations responded quickly to the blasphemy event by holding meetings and agreeing that the case should be resolved immediately so as not to cause religious conflict. Secondly, both Ulama and Umara (leader) worked together and discuss (sit and talk) a quick step in resolving the case and trying to calm the public so that they did not commit vigilante acts. The synergy pattern that is intertwined and articulated here has resulted in a swift, accurate solution to the resolution of the case and can immediately restore a supportive atmosphere for the people of Jambi.

Keywords: Synergy, Ulama, Umara, Case Resolving.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengurai respon dan proses penyelesaian kasus penistaan agama yang terjadi di salah satu hotel di Jambi, di sana ditemukan Pemasangan lafaz Allah pada lantai ornamen pohon natal. Dari studi di lapangan didapatkan bahwa kasus ini termasuk kasus bernuansa sara dan mesti segera diselesaikan, karena berpotensi menimbulkan konflik agama dan amuk massa. Hasil Penelitian menunjukkan Pertama, Pemerintah (Umara) bersama jajarannya dan

Ulama bersama Ormas Islam merespon dengan cepat peristiwa penistaan agama tersebut dengan melakukan pertemuan dan bersepakat agar kasus tersebut harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik agama. Kedua, Baik Ulama maupun Umara bersinergi duduk bersama dan membicarakan (sit and talk) langkah cepat penyelesaian kasus tersebut dan berupaya menenangkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Pola Sinergitas yang terjalin dan terartikulasi di sini telah menghasilkan out put penyelesaian kasus dengan cepat, akurat dan dapat segera mengembalikan suasana kondusif bagi masyarakat Jambi.

Kata kunci: Sinergitas, Ulama, Umara, Penyelesaian Kasus.

Pendahuluan

Dalam sejarah, agama tidak bisa dilepaskan dari politik (negara). Agama membutuhkan Negara untuk memperluas syiarnya dan memperkuat posisinya, sedangkan Negara membutuhkan agama untuk menjadi pilar etis dalam menjalankan roda pemerintahan secara benar dan bermartabat, karena itu agama seringkali muncul bersinergi dengan Politik.

Realitas ini diperkuat oleh penuturan Nurcholish Madjid bahwa salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan dibidang politik. Kenyataan itu menjadi dasar bagi adanya pandangan yang merata di kalangan para ahli, baik muslim maupun non muslim, bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan persoalan kenegaraan. Bahkan disinyalir sesudah kaum muslimin berkenalan dengan Aryanisme Persia muncul ungkapan bahwa "Islam adalah agama dan negara" (*al-Islam Din wa dawlah*) yang mengindikasikan pertautan antara agama dan negara.¹ Dalam sejarah Islam, antara otoritas agama dan otoritas Negara tidak ada pemisahan. Pengalaman umat

¹ M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: Tranmisi Media, cetakan 1, 2012), 109-111. Lihat juga Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), 40. Bandingkan dengan Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi* (Bekasi: Gugus Press, 2002), 5., Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001), 26-27.

Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw bisa dijadikan contoh awal.²

Pada dasarnya, ulama dan umara memiliki peran tidak tergantikan dalam masyarakat. Ulama merupakan pewaris Nabi, berperan menjalankan dakwah untuk terus menanamkan dan merawat ajaran Islam agar terefleksi dalam diri setiap kaum muslim demi terciptanya kehidupan umat yang diridhoi Allah Swt.³ Sementara umara, pemimpin, atau pejabat, menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi terciptanya kehidupan masyarakat dalam sebuah negeri yang dicita-citakan bersama. Keduanya menjalin hubungan sinergis yang ideal agar tugas dan peran masing-masing bisa berjalan beriringan.

Dalam konteks Indonesia, sinergi ulama dan umara telah berlangsung lama, namun dalam perjalanannya mengalami pasang surut, tergantung pada siapa yang memimpin atau memegang kendali utama. Di era reformasi, sinergi ulama dan umara mengalami penguatan, hal ini terlihat dari terakomodirnya fatwa ulama oleh pemerintah dalam berbagai keputusan yang dikeluarkan.⁴

² Thomas W. Arnold, *The Chalipathe*, (London: Rounledge and Kegan Paul, 1965), 30.

³ Bahkan, menurut Ahmad Baso, terdapat sekurang-kurangnya 14 ragam ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat santri-ulama di Nusantara: 1) Ilmu Ushul/Tauhid dan Ilmu Kalam, 2) Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, termasuk Hukum, Undang-Undang, dan Yurisprudensi, 3) Ilmu Tafsir dan Ilmu H(adith), 4) Ilmu Tashawwuf dan Etika/Akhlaq, 5) Ilmu Bahasa dan Tata Bahasa, 6) Ilmu Balaghoh dan Ilmu Manthiq, 7) Ilmu Pertanian, 8) Ilmu Kedokteran dan Pengobatan, 9) Ilmu Falak dan Astronomi, 10) Matematika dan Aljabar, 11) Ilmu Teknik, 12) Ilmu Bumi, Ilmu Alam, dan Biologi, 13) Ilmu Sejarah, dan 14) Ilmu Sosial, Politik, Tata Negara, dan Ekonomi. Lihat: Ahmad Baso, *Pesantren Studies 2b : Sastra Pesantren dan Jejaring Teks-teks Aswaja-Keindonesiaan dari Wali Songo ke Abad 19* (Jakarta: Pustaka Afid, 2012), 119.

⁴ Berbagai fatwa yang dikeluarkan Ulama baik oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga fatwa Nahdlatul Ulama (*bahtsul Masail*), dan lembaga fatwa Muhammadiyah (*Majelis Tarjih*), telah menjadi rujukan bagi Pemerintah dan masyarakat Islam di Indonesia.

Namun kini ada upaya pemisahan jarak antara umara dan ulama, hal ini terjadi oleh banyak faktor yang kompleks. Masyarakat telah jauh mengalami proses differensiasi dan para ulama seakan-akan hanya mengkhususkan diri dalam soal-soal keagamaan. Juga perkembangan ilmu pengetahuan modern menyebabkan perbedaan bidang antara ilmuwan dan ulama. Sekalipun demikian pengaruh ulama pada masyarakat masih tetap besar sehingga fatwa mereka sedikit banyak masih mempengaruhi legitimasi pemerintahan.

Di era ini kepemimpinan umara terasa kurang mengalami legitimasi ketika ulama tidak ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan terutama yang terkait dengan masalah sosial dan keagamaan. Karena itu kebanyakan pemimpin yang sedang berkuasa, baik pada level daerah maupun nasional sering menggandeng ulama untuk memperkuat dukungan kekuasaan dan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Salah satu contoh sinergi ulama dan umara yang menarik dicermati dalam menghadapi, meresponi dan menyelesaikan masalah sosial keagamaan, dalam hal ini sudah menjurus pada konflik Sara⁵, yaitu kasus pemasangan lafaz Allah pada ornamen pohon natal di lantai satu Hotel Novita Jambi, yang terjadi pada akhir Desember 2016 di Jambi.⁶ Informasi awal diketahui dan disebarkan melalui medsos oleh salah satu wartawan muslim di Jambi. Mengetahui hal tersebut masyarakat Muslim lalu

⁵ SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Lihat: BPP-Kemendagri, dalam <http://kesbangpol.bantulkab.go.id>, diakses 20 April 2017.

⁶ Ada Lafaz Allah dalam bahasa Arab yang diletakkan di bawah Hiasan Natal yang terlihat tampak diletakkan di taman atau halaman Gereja yang dibingkai telapak kaki, sedang di atasnya ada Salib dari miniatur halaman Gereja hiasan Natal di lobi Novita hotel, hotel bintang 4 yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Jambi itu. Lihat : <http://m.beritahukum.com>, diakses 25 Desember 2017.

berbondong-bondong mendatangi hotel yang terletak di Pasar Jambi itu, dan hampir saja hotel tersebut diamuk massa, beruntung pemerintah daerah dan tokoh agama segera datang dan menenangkan massa⁷. Kejadian ini sangat disayangkan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat Jambi secara keseluruhan, apalagi Jambi termasuk salah satu provinsi teraman di Indonesia, selain itu suhu “panas” di Jakarta masih terasa hangat, dengan maraknya aksi protes atas pernyataan Basuki Cahaya Purnama, Gubernur DKI Jakarta yang telah melakukan penistaan agama Islam pada 28 September 2016.⁸

Sehari setelah kejadian tersebut, sejumlah ormas dan organisasi kepemudaan di Provinsi Jambi menggelar pertemuan di Masjid Nurdin Hamzah Jambi dan membentuk Forum Umat Islam Jambi untuk mengawal proses pengusutan kasus dugaan penistaan agama di hotel Novita itu. Forum Umat Islam Jambi dalam pertemuan itu mengeluarkan tiga pernyataan sikap; menuntut transparansi proses penyidikan kasus penistaan agama, mendesak manajemen hotel menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam, dan meminta pemerintah daerah mencabut ijin operasional

⁷ Informasi diperoleh dari M. Tahir Rahman, kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi yang juga hadir di lokasi kejadian itu mengatakan, “Sekiranya pihak Pemerintah Daerah, Ulama (tokoh agama) dan pihak keamanan tidak segera hadir menenangkan massa, maka akan terjadi amuk massa dan kejadian anarkis. Saat itu Gubernur dan Wali Kota Jambi yang berdampingan dengan tokoh agama (Ulama) membicarakan langkah cepatnya, dan diperoleh keputusan untuk menutup sementara hotel tersebut dan keesokan harinya dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian kasus sara tersebut. Wawancara dengan M. Tahir Rahman, Kakan Kemenag Provinsi Jambi, 5 Januari 2017.

⁸ Kasus yang terjadi di Jambi ini dapat masuk dalam ranah pidana (penistaan agama). Indonesia melarang penistaan agama dalam KUHP-nya. Pasal 156(a) menyoal setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156(a) dipidana penjara selamalamanya lima tahun. Pasal 156(a) melengkapi dekret Presiden Sukarno yang dijalankan oleh Presiden Soeharto, yaitu Dekret Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

hotel tersebut secara baku. Pertemuan tersebut dihadiri antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Alumni HMI (KAHMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Front Pembela Islam (FPI).⁹

Mencermati panasnya situasi pada saat itu, maka Pemerintah, termasuk pihak keamanan melakukan pertemuan dengan Ulama (Tokoh Ormas Islam MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI) untuk mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah guna merumuskan cara penyelesaian persoalan tersebut secara cepat, tepat dan transparan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, nilai tambah penelitian ini yang dapat penulis berikan ialah stressingnya (penitik beratan/penekanan) dalam menjadikan model atau bentuk kolaborasi antara ulama dan umara yang ternyata mampu menghasilkan kekuatan dan melahirkan cara menyelesaikan atas persoalan sara yang terjadi di masyarakat secara cepat dan tepat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola hubungan ulama dan umara dalam kasus sara dan konsekuensinya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Pembahasan

Secara bahasa, ulama berasal dari kata kerja dasar '*alima*' artinya mengetahui; berubah menjadi kata benda pelaku '*alimun*' (bentuk *mufrad/singular*) yang bermakna orang yang mengetahui dan ulama (bentuk *jamak taksir/irregular plural*). Berdasarkan istilah, pengertian ulama dapat dirujuk pada al-Quran dan hadis. Dalam al-Quran terdapat ayat yang berbunyi; *Sesungguhnya yang paling taqwa kepada Allah di antara hamba-Nya adalah ulama*.¹⁰

Mengingat ulama adalah golongan yang ahli agama, cendekiawan atau intelektual, maka tidak bisa dinafikan bahwa kehadiran ulama di tengah masyarakat sangatlah penting. Secara

⁹ Lihat dalam <http://rri.co.id>, diakses 29 Januari 2017.

¹⁰ QS Fathir; ayat 28.

teologis, hal ini dibenarkan oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa para ulama itu adalah pewaris para Nabi¹¹. "*al-'ulama' waratsat al-anbiya'*", artinya ulama memiliki otoritas untuk menyiarkan dan mengembangkan agama serta membimbing masyarakat dan umat dalam konteks berakhlak yang mulia. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa dalam rentang sejarah Islam, ulama memiliki peran penting melanjutkan misi kerasulan pasca nabi terakhir Muhammad Saw dalam penyebaran dan pengembangan Islam.

Penegasan teologis mengenai eksistensi ulama di atas sekaligus telah melegitimasi otoritas ulama terutama di bidang keilmuan. Hal ini menyebabkan peran ulama sepanjang sejarah Islam sangatlah besar karena Islam sendiri sangat menghargai ilmu dan menempatkannya pada posisi yang sangat mulia. Dalam sejarah Islam, ulama dan ilmuan¹² bahkan bekerja sama dalam membangun peradaban Islam. Bukti peradaban ini dapat dilihat dari lahirnya sejumlah pemikiran-pemikiran yang cemerlang, karya-karya yang brillian dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang fikih, misalnya, tokoh seperti Imam Syafi'i (w. 204 H/820 M) dikenal luas sebagai ulama tradisional yang, boleh dibilang, paling otoritatif dalam bidang fikih terutama melalui karyanya *al-Risâlah*. Otoritas Imam Syafi'i terbukti dengan dijadikannya teologi al-

¹¹ Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz. 3 (Beirut: Darul Fikri, 1994), 313.

¹² Dikotomi antara "ulama" dan "ilmuan" agaknya telah terjadi sejak mulai berkembangnya tradisi keilmuan Islam seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, dan falsafah. Tiga yang pertama merupakan bidang keahlian para ulama, sedangkan yang terakhir yakni falsafah yang berkembang menjadi kajian ilmu-ilmu empiris dalam Islam menjadi garapan para ilmuan atau filosof Muslim. Meski dalam banyak hal, para ilmuan maupun filosof Muslim sebetulnya adalah "ulama" dalam soal keilmuan. Ibnu Sina, misalnya, dikenal telah hafal al-Qur'an sejak usia tujuh tahun dan pembela kalam Mu'tazilah. Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf yang tulisannya tentang *Bidâyah al-Mujtahid* di bidang fikih menjadi rujukan banyak ulama tradisional. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sifat keilmuan ulama/ilmuan pada ketika itu yang ensiklopedis dan tidak mengenal batas antara ilmu agama atau ilmu normatif dan ilmu empiris. Lihat juga Bahrul Ulum, *Ulama dan Politik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015, 8-9.

Syafi'i sebagai satu-satunya teologi skolastik yang diajarkan sejak paruh abad ke-9.¹³

Ulul amri adalah orang yang memegang kekuasaan atau pemegang pemerintahan, yang dapat mengambil keputusan dan menangani pelbagai persoalan. Oleh karena di dalam Islam tidak ada pemisahan yang tajam antara soal-soal yang sakral dengan yang sekular, maka adanya suatu pemerintah bisa diharapkan dapat berjalan di atas kebenaran, dan dapat bertindak sebagai Imam yang shalih; benar dan bersih pula. sebagaimana isyarat dari ayat al-Qur'an; *"Di antara kewajiban umara adalah menerapkan pemerintahan yang berkeadilan. Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang layak menerimanya. Apabila kamu mengadili di antara manusia, bertindaklah dengan adil. Sungguh Allah mengajar kamu dengan sebaik-baiknya. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat"*.¹⁴

Ayat di atas turun berkenaan dengan Usman bin Thalhah sebagai juru kunci Ka'bah. Ketika itu Rasulullah Saw mengambil kunci Ka'bah untuk memasukinya. Setelah keluar, beliau membaca ayat di atas dan menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepada Usman.

Begitu pentingnya kehadiran dua golongan ini, karena mereka ini menentukan kesejahteraan dan kesengsaraan umat manusia (rakyat), mereka inilah yang akan membangun karakter umat secara imbang, utuh dan terpadu, sehingga Rasulullah Saw menegaskan; *"Dua golongan manusia, jika mereka baik, akan baik seluruh manusia, dan jika ia rusak, akan rusak seluruh manusia. Mereka adalah para ulama dan umara."* (HR Ibnu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya).

Hadits Nabi di atas memberikan isyarat dan peringatan kepada umat Islam yang keberadaannya mayoritas di negeri ini. Bahwa suatu negeri akan berjalan pada koridor yang baik dan benar apabila ada nilai kesalehan para ulama dan keadilan umara

¹³ George A. Makdisi, *Cita Humanisme Islam, Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaisans Barat*, terj. A.Syamsu Rizal & Nur Hidayah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000), 27.

¹⁴ QS An-Nisaa' [4]: 58.

(penguasa). Sebaliknya, suatu negeri akan mengalami kerusakan, ketidakstabilan dan kesengsaraan apabila ulama tidak memberikan panutan yang baik dan umara berlaku *zhalim* pada rakyatnya.

Umara yang saleh adalah shiddiq, adil, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Ia bekerja untuk kepentingan rakyatnya di siang hari. Namun saat malam, ia bermunajat kepada Tuhannya untuk kemudahan beban kekuasaan itu.

Umara perusak adalah cenderung mementingkan diri sendiri dan kolega, menyalahgunakan jabatan dan tidak peduli pada nasib rakyatnya, bahkan rakyat dibebani berbagai pajak untuk menunjang kesejahteraan dirinya dan upaya mempertahankan kekuasaannya. Umara perusak ini juga selalu meminggirkan dan menghukum orang-orang yang tidak sepaham dengannya, membelenggu media yang kritis terhadap kebijakannya.

Kronologi Peristiwa

Hotel Novita, sebuah hotel di pusat Kota Jambi, diduga telah melakukan penistaan agama Islam dengan menulis/memasang lafaz Allah pada ornamen Natal di lantai dasar hotel Novita. Kasus sangat menghebohkan masyarakat Jambi karena lafaz Allah ditulis di lantai dan dalam bingkai telapak kaki yang dikelilingi batu kerikil putih.

Temuan tersebut tidak hanya membuat heboh di dunia maya tetapi juga masyarakat Jambi dalam waktu singkat memenuhi hotel tersebut. Selain itu hadir juga pihak kepolisian, TNI, dan Ormas Islam. Mereka penasaran untuk melihat langsung ornament objek tersebut, dan hampir saja terjadi amuk massa, jika pihak Kepolisian tidak segeraantisipasi dan mengawal ketat. Tidak lama kemudian, tulisan lafaz Allah sudah diacak, sehingga tidak lagi tampak tulisan utuh. Kronologis kejadian tersebut hingga dilakukan penutupan hotel, dituturkan secara lengkap oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasha:

“Pada tanggal 23 Desember 2016, saya mendapat informasi melalui *whatsApp* bahwa ada kejadian penulisan lafaz Allah yang dibuat berbentuk kaligrafi di

lantai dasar ornamen Gereja di hotel Novita kota Jambi, dan telah menimbulkan reaksi umat Islam, tidak hanya di kota Jambi tapi juga reaksi nasional dan dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Brunai, yang ikut menyanyangkan perbuatan tersebut. Umat Islam menuding bahwa hal itu terjadi karena pemilik hotel adalah non muslim, sehingga meletakkan lafaz Allah itu berada di bawah Gereja, inilah yang kemudian mereka anggap sebagai sebuah penistan agama. Menjelang magrib sudah ada upaya pihak aparat keamanan yang turun tangan untuk memeriksa dan menyelidiki kejadian itu. Selepas isya, setelah saya menghadiri undangan maulid nabi di dua tempat, saya lalu pulang sekitar jam 23 kurang (11 malam), namun menjelang dekat rumah dinas wali kota, saya merasa mendapat firasat yang tidak baik, seolah saya mendapat bisikan supaya sgera ke hotel dan melihat kejadian langung. Karena penasaran, saya kemudian menuju hotel novita lewat melalui jembatan makalam yang saat itu kondisi jalan sudah macet sehingga tidak bisa menembus brigade massa. Saya akhirnya turun dari mobil dan jalan kaki menuju hotel yang dikawal aparat keamanan. Sambil berjalan saya melihat kerumunan massa di jalan dan memperkirakan massa waktu hampir 10 ribu karena jalan full semua. Begitu sampai di depan hotel, ternyata massa sudah emosi dan teriakan massa waktu itu adalah bakar dan tutup hotel. Ketika sampai ke hotel, ternyata lafaz sudah dibogkar, kemudian bertemu aparat dari kepolisian, ada Kapolresta, Kodim, Polda ada Korem, Kasrem dan pihak-pihak lain. Saya tanya kepada Forkompida, Kodim dan Ppolres, tindakan apa yang yang kita ambil untuk menangani kasus ini, mereka serahkan ke pak wali. Saya lalu berbicara kepada massa, namun massa berteriak bakar hotel, tutup hotel, cabut izin hotel.

Lalu saya katakan kalau begitu berikan waktu 10 menit untuk kami rapat, kemudian kami rapat dengan Forkompinda Provinsi dan kota, manager hotel dan perwakilan Ormas Islam, setelah itu saya bicara pada pemilik hotel dengan memberikan dua pilihan, pertama hotel akan ditutup sementara tetapi kondisi aman atau kedua, hotel tidak ditutup, tetapi hotel akan dibakar masaa. Manager hotel memilih opsi pertama untuk tutup sementara hotel tersebut. Beberapa menit kemudian, saya lalu tulis di karton bahwa hotel saat ini ditutup dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Keputusan penutupan hotel itu memberikan kepuasan pada massa, dan akhirnya massa berangsur-angsur pulang.”¹⁵

Menghadapi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang menyayangkan kejadian tersebut dan desakan berbagai komponen masyarakat agar kasus ini segera dituntaskan, maka pihak pemerintah (umara) bersama tokoh ormas Islam (ulama) melakukan komunikasi intensif dan bergerak cepat, sehingga beberapa minggu kemudian pelaku penistaan agama itu bisa diungkap dan diproses ke ranah hukum. Tindakan wali kota bersama pihak Forkompinda dan ormas Islam tersebut mendapat apresiasi dan pujian, bukan hanya dari pihak lokal, tapi juga pihak nasional dan dari dunia internasional, karena mampu bertindak dan menyelesaikan kasus penistaan agama itu dengan cepat dan akurat.

Respon Ulama dan Umara terhadap Kasus Penistaan Agama di Jambi

Pasca kejadian penistaan agama tersebut, berbagai respon segera bermunculan, baik melalui media sosial maupun yang langsung mendatangi lokasi kejadian. Informasi tentang kejadian begitu cepat beredar melalui media *handphone*. Masyarakat yang datang bukan hanya dari kalangan pejabat, pihak keamanan,

¹⁵ Wawancara dengan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, tanggal 13 Juni 2018 di Jambi.

pemerintah, atau tokoh-tokoh Ormas Islam, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat, untuk melihat secara langsung. Berbagai respon bermunculan dari tokoh-tokoh masyarakat yang menyayangkan peristiwa tersebut. Di antara tokoh masyarakat tersebut adalah ketua MUI Provinsi Jambi, Hadri Hasan. Menurutnya kasus ini harus diselesaikan secara hukum, dan menghimbau kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menyelesaikan kasus ini, agar kasus ini tidak melebar ke hal-hal negatif yang justru merugikan kita semua.¹⁶

Demikian juga respon ketua PWNU Provinsi Jambi, Aminullah Amit yang mengatakan bahwa peristiwa penistaan agama ini sangat disayangkan terjadi di Jambi yang dikenal sebagai daerah yang aman dan harmonis. Untuk itu Ia mengharapkan kepada pihak keamanan bersama pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus ini karena apabila tidak segera, maka dikhawatirkan akan terjadi amuk massa dari pihak Islam apalagi mendekati hari natal. Selain itu menghimbau kepada umat Islam untuk tidak terprovokasi oleh hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini di luar jalur hukum. Dia juga mendesak, agar pihak kepolisian bisa secepatnya menyelesaikan kasus ini.¹⁷

Selain itu, Wakil Ketua PW Muhammadiyah, Nasroel Yasier dengan tegas mengutuk keras ulah dari oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Pihak manajemen hotel mesti bertanggung jawab terkait kejadian itu. Kalau memang pihak hotel terlibat, kami mendukung penutupan hotel dan meminta pihak kepolisian agar serius menelusuri oknum-oknum yang sengaja mengadu domba lewat agama di Provinsi Jambi. Dia juga meminta seluruh Umat untuk menahan diri dan memberikan kepercayaan kepada aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus ini.¹⁸

¹⁶ Lihat <https://sketsanews.com>, dikases 28 Juni 2018

¹⁷ Wawancara dengan ketua PWNU Provinsi Jambi, Aminullah Amit, tanggal 3 Juni 2018 di Jambi.

¹⁸ Lihat www.jambipos-online.com, dikases pada tanggal 29 Juni 2018.

Ketua Front Pembela Islam Provinsi Jambi, Habib Taufik mengatakan bahwa ketika menerima informasi tentang kasus penistaan agama tersebut, Dia segera meminta lascar FPI untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan, dan setelah dicek ternyata informasi itu benar. Banyak saksi melihat bahwa laskar FPI menjadi tameng dalam menghalangi upaya pembakaran hotel. Karena organisasi ini front, maka FPI selalu harus berada di depan¹⁹. Sedangkan Ahmad Sukri, Ketua Front Pembela Islam Kota Jambi menyatakan tidak terima dengan ulah yang dilakukan oleh oknum pegawai hotel novita yang mensejajarkan asma Allah dengan alas kaki manusia. Ia meminta kepada aparat dan pemerintah untuk memberikan perhatian secara khusus, transparan, dan lebih cepat pada kasus ini, sehingga tidak menjadi pemicu munculnya persoalan yang dapat memecah belah umat beragama²⁰.

Respon dari kalangan Ulama atau Ormas Islam tersebut adalah sikap spontan dari mereka yang melihat kasus itu sangat urgen untuk segera diambil langkah-langkah tepat dan cepat dalam menyelesaikannya, mengingat kasus seperti ini termasuk kasus sara yang berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat, dan dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama, serta terjadinya gangguan keamanan.

Masing-masing pimpinan Ormas Islam juga berupaya memberikan informasi tentang situasi terkini dari kejadian tersebut dan berusaha menenangkan umat dan anggotanya agar tidak terprovokasi dari hasutan yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang mencoba memanfaatkan situasi yang tidak kondusif itu.

Dari kalangan umara, respon diberikan oleh pejabat-pejabat pemerintah seperti Gubernur Jambi, Kapolda Jambi dan. Wali Kota Jambi. Gubernur Jambi, Zumi Zola meminta masyarakat Provinsi Jambi tidak tersulut oleh peristiwa ini, dan menghimbau agar masyarakat di Provinsi Jambi tetap menjaga toleransi Umat

¹⁹ Wawancara dengan Ketua Front Pembela Islam Provinsi Jambi, 28 Agustus 2018.

²⁰ Lihat <https://news.okezone.com>, dikses pada tanggal 30 Juni 2018.

Beragama yang sudah terpujuk selama ini. Beliau meminta semua pihak mulai masyarakat umum dan ormas menjaga keamanan tetap kondusif dan percayakan kepada hukum yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa Provinsi Jambi berdasarkan data Kemendagri dikenal sebagai daerah teraman ketiga di Indonesia, karenanya nama baik daerah ini harus kita rawat bersama-sama²¹

Pasca dugaan penistaan agama itu Gubernur Jambi, Zumi Zola mengadakan rapat mendadak di rumah dinas Gubernur Jambi yang dihadiri oleh MUI Jambi, tokoh Ormas Islam; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, FPI, FKUB, tokoh Pemuda tokoh lintas agama, dan lain-lain. Dalam pertemuan tersebut melahirkan beberapa kesepakatan untuk disikapi secara bersama. Kesepakatan yang lahir dari pertemuan tersebut ada tiga poin; *pertama*, menyesalkan terjadinya kasus penodaan agama dengan modus ornamen Pohon Natal yang ada tulisan lafaz Allah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. *Kedua*, menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan hukum apabila ternyata terdapat unsur kesengajaan oleh pihak tertentu dan melakukan penistaan terhadap agama Islam. *Ketiga*, menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di Provinsi Jambi, dan tidak akan melakukan tindakan aksi turun ke jalan atau melakukan tindakan anarkis terkait permasalahan tersebut²².

Selain itu Kapolda Jambi Brigjen Pol Yazid Fanani mengatakan bahwa setelah mengetahui adanya kasus tersebut, Ia langsung menurunkan aparat ke lokasi kejadian, dan menyiapkan aparat yang siap berjaga di sekitar hotel. Kepada masyarakat diminta agar bersabar menunggu proses pengungkapan pelaku yang sedang dtangani, dan meminta juga kepada masyarakat dapat membantu mendoakan agar kasus ini dapat segera terselesaikan²³.

Wali Kota Jambi, Syarif Fasha yang hadir ke lokasi kejadian langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan, pejabat pemerintah dan Ormas Islam. Setelah melakukan perundingan

²¹ Lihat www.jambipos-online.com, diakses pada tanggal 29 Juni 2018

²² Lihat news.okezone.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

²³ Lihat www.tribunislam.com, diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

dengan pihak manajemen hotel, hotel lalu ditutup sementara oleh Wali Kota Jambi. Kemudian ketika terjadi aksi demo di halaman masjid agung, beliau menyampaikan kepada umat agar jangan terpancing dan tetap berfikir jernih. Selanjutnya dikatakan berikan kepercayaan kepada aparat keamanan untuk mengungkap pelakunya²⁴. Munculnya respon yang begitu cepat dari pihak Ulama dan Umara menunjukkan kepedulian dan keseriusan yang tinggi untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat. Tindakan wali kota bersama pihak Forkompinda dan ormas Islam tersebut mendapat apresiasi dan pujian, bukan hanya dari pihak lokal, tapi juga pihak nasional dan dari dunia internasional, karena mampu bertindak dan menyelesaikan kasus penistaan agama itu dengan cepat dan akurat.

Apabila dicermati dari respon di atas terlihat bahwa pada umumnya mereka bersepakat bahwa penulisan lafaz Allah pada *ornament* pohon natal dan di lantai dasar di hotel tersebut adalah sebuah penistaan agama tertentu dan berpotensi memicu konflik sara, karena itu mereka semua menegaskan kepada pihak keamanan harus serius dan segera mengungkap oknum warga atau pegawai hotel yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan kalangan ulama dan umara juga bersepakat untuk menenangkan umat atau warganya masing-masing agar tidak terpancing untuk melakukan aksi demo aksi anarkis terhadap agama tertentu.

Pola Sinergitas Ulama dan Umara (Artikulasi) dalam Menyelesaikan Kasus Penistaan Agama di hotel Novita Jambi

Artikulasi dalam KBBI berarti “lafal, pengucapan kata”²⁵, kata artikulasi jika diimbui dengan awalan kata “me” dan akhiran kata “kan” menjadi “mengartikulasikan” yang artinya melafalkan, mengucapkan kata-kata dengan jelas dan tepat²⁶, maka dalam hal ini penulis berupaya untuk memberikan “pelafalan/pengucapan”

²⁴ Wawancara dengan Syarif Fasha, Wali Kota Jambi tanggal 27 Juni 2018 di Jambi.

²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/artikulasi>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengartikulasikan>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

termasuk pula megartikan, mendeskripsikan/memaparkan secara jelas pola hubungan ulama dan umara dalam menyelesaikan kasus penistaan agama di hotel Novita Jambi.

Indonesia adalah negara yang memiliki komposisi penduduk yang heterogen, pencarian berbagai model penyelesaian konflik atau sumber konflik adalah kebutuhan mendesak yang harus segera ditemukan. Berbagai metode atau mekanisme penyelesaian konflik telah ditempuh guna menyelesaikan konflik bernuansa agama, namun masih ada yang memunculkan konflik-konflik baru yang tidak berkesudahan. Salah satu yang harus diajukan bagi umat Islam Indonesia adalah resolusi konflik yang lebih humanis dan holistik.

Meskipun disadari bahwa agama bukanlah menjadi faktor utama (*core conflict*) sebagai pemicu timbulnya konflik, namun dalam kasus penistaan agama yang terjadi di hotel Novita Jambi terlihat bahwa nuansa agama sangat kuat karena meletakkan symbol utama salah satu agama pada posisi yang sangat rendah. Tetapi apakah murni semata-mata karena si pelaku bermaksud merendahkan agama tertentu, atau karena motif lain, inilah yang masih harus ditelusuri secara mendalam, apalagi diduga kalau hotel ini sedang mengalami problem biaya operasional, masih menjadi pertanyaan besar, karena pelaku yang sudah ditemukan masih mengelak kalau dia pelakunya.

Tokoh masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan sangat diperlukan untuk menangani konflik keagamaan, mereka dapat bersinergi sebagai aktor dengan saling mendukung dan melengkapi. Dalam banyak konflik sosial termasuk konflik yang berlatar agama para pihak sama-sama berperan dalam menciptakan dan menangani hingga tuntas terhadap persoalan konflik yang dihadapi. Karenanya, pihak-pihak yang bertikai harus juga diperlakukan sebagai aktor, yaitu pihak yang terlibat dalam proses konstruksi konflik dan tindak kekerasannya. Konflik dan kekerasan terjadi sebagai akibat dari tindakan mereka mengejar tujuan dan kepentingan dengan mengabaikan stimulus dalam melakukan konflik.

Pihak pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian daerah setelah mendapat laporan resmi dari salah satu ormas Islam, segera turun ke lokasi kejadian dan mengambil langkah-langkah antisipasi kemudian duduk bersama dengan Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Wali Kota Jambi) dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengambil langkah-langkah tepat dan cepat dalam mengantisipasi terjadinya amuk massa, serta mempersiapkan langkah-langkah pengungkapan aktor dan pelaku penista agama tersebut.

Hal ini sebagaimana wawancara dengan AKBP Kristian Adi W, Kasubdit Ditraskrim umum Polda Jambi. Menurutnya: "Setelah mendapat laporan dari salah satu Ormas Islam tentang peristiwa penistaan agama tersebut, pihak Kepolisian segera membentuk tim penyelidikan, tim sidik, dan tim porenisk. Pada saat itu Kapolda dan Kapolresta langsung turun ke lokasi untuk meredakan masyarakat agar tidak terjadi kasus demo besar seperti di Jakarta terkait dengan kasus Ahok. Proses berjalan sampai terungkaplah nama Reza, itu juga prosesnya panjang. Pada saat pemeriksaan, keterangannya berubah-ubah, ketika ditanya A tidak selalu dijawab A, kami melakukan pendekatan lain untuk membuktikan bahwa Reza pelakunya, kami rekam pada saat pemeriksaan, ternyata apa yang dilakukan, pada saat itu kelihatan tidak sinkron dengan apa yang dikatakan. Lalu kami menggunakan sidik jari, namun sidik jarinya tidak terbaca karena batu yang dipegang itu mengandung minyak, sehingga tidak muncul, lalu kami ambil CCTV yang bisa menyorot peristiwa itu, di mana aktivitas yang bersangkutan berada di sekitar itu. Dari beberapa saksi yang ditanya mengatakan bahwa yang bersangkutan beraktivitas di seputaran lokasi penulisan lafaz Allah di Pohon natal itu, namun tidak tahu persis apa yang dia lakukan, tapi nampak bahwa dia ada di situ. Dari bukti bukti itu itulah kami bisa persangkakan kalau dia yang melakukan. Pada saat itu kondisi genting karena atensi publik melalui media bermunculan terus²⁷.

²⁷ Wawancara dengan AKBP Kristian Adi W, Ksubdit di Ditraskrim umum Polda Jambi, tanggal 10 Juli 2018 di Polda Jambi.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, Aminullah Amit sejak awal kejadian cukup aktif mengambil peran. Menurutnya penyelesaian kasus ini termasuk cepat karena ada kemauan yang kuat dari semua kalangan untuk sama-sama berkontribusi dan saling bersinergi satu sama lain terutama pihak pemerintah bersama aparatnya dan pihak tokoh-tokoh agama.. Selain itu Pengurus Wilayah NU juga mengadakan rapat untuk merespon kasus tersebut. Dalam rapat yang dihadiri organisasi badan otonom NU secara tegas membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh organisasi Badan Otonom NU. Isi pernyataannya antara lain menyesalkan adanya penistaan pada agama tertentu, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keamanan untuk mengusut tuntas pelaku penistaan itu, meminta pihak manajemen hotel Novita untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan mengajak organisasi Banom NU untuk bersama-sama dengan pemerintah mencari solusi dan membantu penyelesaian kasus tersebut.²⁸

Sementara itu, salah satu ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi, Arman Syafaat mengungkapkan bahwa peristiwa penistaan agama itu merupakan perbuatan yang ingin menjadikan Jambi tidak aman, karena itu pihak Muhammadiyah segera merapatkan barisan dengan mengundang organisasi otonom Muhammadiyah agar bersama-sama merespon kasus tersebut, dan meminta agar mereka tidak berlaku anarkis. Untuk pengungkapan siapa pelakunya, serahkan saja pada pihak penegak hukum. Muhammadiyah juga aktif berkontribusi memberikan masukan pada pihak pemerintah ketika ada pertemuan yang membahas kasus tersebut.²⁹

Kedua Ormas Islam ini sepakat bahwa harus ada penyelesaian yang cepat terhadap kasus ini agar tidak menimbulkan gesekan dan potensi konflik agama di Jambi, dan juga sepakat kasus ini menjadi tanggung jawab pihak penegak

²⁸ Wawancara dengan Ketua PWNU Provinsi Jambi, tanggal 3 Juni 2018

²⁹ Wawancara dengan salah satu ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Arman Syafaat tanggal 2 Juli 2018.

hukum serta mereka bersedia bersama pihak pemerintah dan penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak timbul tindakan main hakim sendiri apalagi bertindak anarkis.

Menurut AKBP Kristian, Pihak Kepolisian dapat segera mengungkap pelaku cepat dan Jambi segera kondusif, selain karena kerja keras anggota kepolisian, keseriusan Bapak Kapolda, pihak Forkompinda, tiap malam selalu dilakukan analisa. Terdapat juga peran strategis dari tokoh-tokoh masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, Kemenag, PFI, FKUB, Tokoh adat yang terus memantau dan ikut mendinginkan suasana di Jambi agar masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang main hakim sendiri karena potensi waktu itu sangat kuat, sempat terjadi demonstrasi dari sebagian Ormas Islam setelah shalat jumat di seputaran masjid al-Falah yang merespon secara umum peristiwa tersebut dan mendesak pihak pemerintah dalam hal ini pihak keamanan untuk segera mengungkap pelakunya dan meminta maaf atas perbuatannya. Penyelesaian kasus ini dengan cepat bisa menjadi model sinergi antara pihak pemerintah (umara) dengan pihak tokoh-tokoh umat Islam (ulama), bahwa kasus yang terindikasi sara hendaknya diselesaikan secara bersama-sama dengan berbagai elemen tokoh masyarakat.³⁰

Menurut teori konflik, bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh penguasa tunggal, namun juga dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup kuasa, dengan posisi yang berbeda dan terikat hubungan dengan yang lainnya. Kekuasaan karenanya senantiasa terartikulasi melalui pengetahuan, sementara pengetahuan selalu menimbulkan efek kuasa, karena itu pemegang kekuasaan utama akan menjalankan kekuasaan dengan partikelir lain agar kekuasaan berjalan dengan baik, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dalam masyarakat. Inilah yang disimbolkan dengan Pemegang kekuasaan pemerintahan di negara ini yang dinamakan Umara yang menguasai regulasi pemerintahan secara teori dan

³⁰ Wawancara dengan AKBP Kristian Adi W, tanggal 10 Juli 2018 di Polda Jambi

praktik dan *diback up* oleh Ulama, yang memiliki berbagai Ilmu terutama ilmu agama.

Terkait dengan kasus penistaan agama berupa penulisan lafaz Allah pada ornamen pohon natal tersebut, Ulama dan Umara telah menampilkan diri dengan mengambil peran-peran nyata untuk mencari penyelesaian cepat terhadap kasus tersebut. Berbagai upaya dilakukan dengan mengambil tindakan cepat untuk meredam amuk massa pada saat peristiwa terjadi dan pasca kejadian untuk ikut berkontribusi menemukan pelaku penista agama. Pihak pemerintah daerah bekerja cepat merespon persoalan ini dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh agama karena hal ini termasuk masalah penistaan agama. Pertemuan cepat dan intensif pemerintah Provinsi dan Kota Jambi bersama tokoh-tokoh masyarakat tersebut guna untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dan penyelesaian cepat atas kasus yang bernuansa sara itu.

Menurut Azrai Abbasyari, ketua lembaga Adat Melayu Jambi, bahwa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk kasus penistaan agama dan kasus-kasus lainnya, menurut adat melayu Jambi memberikan amanah kepada lembaga yang diberi nama *tali tiga sepilin, yaitu raja (pemerintah), ulama, dan tokoh-tokoh adat*. Telah menjalankan fungsinya selama ratusan tahun, meskipun pada masa penjajahan Belanda dan Jepang fungsinya dikebiri dan diganti dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan penjajah. Sejak Indonesia Merdeka hingga kini, fungsi itu dipertahankan. Mereka membuat berbagai aturan-aturan bermasyarakat, seperti tata etika dan norma-norma sebagai pedoman dan tuntunan kehidupan di masyarakat. Ketiga lembaga adat tersebut selain menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa, juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial keagamaan.

Menurutnya ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat, dalam hal ini kasus penistaan agama, maka ketiga lembaga tersebut bermusyawarah (*sit and talk*) membicarakan dan mencari solusi pemecahan terhadap kasus yang dihadapi. Ada seloko adat Jambi

yang menjadi dasar dalam melaksanakan musyawarah untuk mufakat tersebut, yaitu; “Bulat air dek pembuluh, bulat kato dek mufakat. Kato sorang kato bapecah kato besamo kato mufakat, duduk sorang besempit-sempit duduk besamo belapang-lapang”. Di samping itu nenek mamak juga berperan “Sebagai kayu gedang dalam negeri” rimbun tempat berteduh, gedung tempat bersandar, pergi tempat betanyo, balik tempat berito, menciptakan kerukunan hidup masyarakat di dalam desa melalui “arah ajum, kusut menguasai, silang mematutu, keruh menjernihkan”. Dalam mufakat ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sampai menemukan kata putus menurut adat, ketentuan tersebut salah satunya dengan melihat akar dari suatu permasalahan, Seloko adat Jambi menyebutkan “Dak ado asap kalo dak ado api, kalo aek keruh dimuaro cubo tengok ke hulu”.³¹

Seloko Jambi tersebut menunjukkan pentingnya musyawarah atau duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dan keagamaan. Seloko adat Jambi yang menggambarkan pentingnya bermufakat dalam mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan isyarat kuat yang ada dalam Islam seperti tertuang dalam al-Qur’an Surat al-Imran; 159 *...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.*

Dari seloko adat tersebut tersirat, bahwa segala permasalahan yang ada terlebih dahulu diselesaikan secara adat, dan jika tidak bisa diselesaikan secara adat, baru mengacu kepada hukum yang lebih tinggi (*Undang Selingkung Alam atau hukum positif*). Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang religius, sehingga hukum adat Jambi senantiasa berpedoman pada ketentuan agama yang tergambar dalam seloko “Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah”. Syara mengato, adat Memakai” Adat bersendi syara’ berarti aturan-aturan dalam

³¹ Wawancara dengan Azrai Abbasyari, ketua lembaga Adat Melayu Jambi, tanggal 27 Agustus 2018

masyarakat Jambi yang bernama adat berlandaskan aturan-aturan agama Islam yang disebut *syara'*. *Syara'* bersendi kitabullah berarti aturan-aturan dalam masyarakat Jambi berlandaskan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis yang diberi simbol kitabullah.

Sinergitas antara ulama dan umara adalah hubungan yang dilandasi kepentingan umat atau kepentingan berbangsa dan bernegara. Artinya, hubungan yang berorientasi pada penegakan nilai-nilai moral, agama, dan cita-cita bersama, termasuk mewujudkan perdamaian bangsa dan menguatkan NKRI. Sinergitas yang dijalin di sini adalah kerjasama yang terjalin dan menghasilkan *out put* kemaslahatan yang lebih besar daripada penjumlahan hasil *out put* apabila dilakukan tanpa bersinergi. Tindakan yang bersinergi dan cepat telah terartikulasi dalam menyelesaikan kasus penistaan agama ini. Sinergi di sini tidak hanya antara Ulama dan Umara, tetapi juga bersama pihak adat Jambi, sebagaimana peran lembaga *tali tiga sepiling* yang sudah memasyarakat dalam adat budaya Jambi.

Penutup

Sinergi Ulama dan Umara yang melibatkan komponen utama yang lain dalam masyarakat telah terbukti dapat menyelesaikan kasus yang terkait dengan penistaan agama. Artikulasi sinergisitas itu adalah wujud dari pengamalan al-Quran Surah al-Imran ayat 159 tentang keutamaan bermusyawarah, yang senada dengan seloko adat Jambi yaitu; "*Bulat air dek pembuluh, bulat kato dek mufakat*", yang maknanya adalah pentingnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan melibatkan kalangan tokoh-tokoh masyarakat terutama pihak Umara dan Ulama. Inilah makna seloko adat yang berbunyi Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah, *Syara'* mengato, Adat memakai. Model Sinergitas seperti ini dapat menghasilkan *out put* kemaslahatan yang lebih besar daripada hasil *out put* apabila penyelesaian kasus dilakukan tanpa bersinergi.

Penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan yang menjalin sinergi dengan entitas Umara, Ulama dan Tokoh Adat akan menghasilkan *out put* kemaslahatan yang lebih besar daripada tanpa adanya sinergi. Untuk itu sebagai rekomendasi, perlunya dibentuk lembaga yang memadukan unsur pemerintah, ulama dan adat dengan memberikan fungsi dan wewenang yang jelas, dari unsur pemerintah dapat dengan pembentukan badan tingkat pusat yakni pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten) sampai ke tingkat kecamatan dan desa, badan/lembaga ini aktif mengambil peran dalam penyelesaian kasus-kasus terkait masalah sosial-keagamaan.

Daftar Pustaka

- Algar, Hamid. "Ulama", dalam Mircea Eliade (Editor in chief), *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 15. New York: Macmillan Publishing Company, 1987.
- Baso, Ahmad. *Pesantren Studies 2b : Sastra Pesantren dan Jejaring Teks-teks Aswaja-Keindonesiaan dari Wali Songo ke Abad 19*. Jakarta: Pustaka Afid, 2012.
- Buhori, Didin Saefuddin. *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009.
- Burhanudin. *Ulama dan Kekuasaan; Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, terj. Testriono, Olan Dahuri, dan Irsyad Rhafsadi, Jakarta: Mizan, 2012
- Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistani Abu. *Sunan Abi Dawud*, Juz. 3. Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Eriyanto. *Analisa Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Faiz, Fahrudin. *Kekerasan Intelektual dalam Islam Telaah terhadap Peristiwa Mihnah Mu'tazilah*. ESENSIA Vol. XIII No. 1 Januari 2012.
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses 27 Juli 2018.
- <http://www.google.com>, diakses, 17 Juli 2018.
- <https://news.okezone.com>. diakses pada tanggal 30 Juni 2018.

- <https://news.okezone.com.>, dikses pada tanggal 30 Juni 2018.
- <https://pkub.kemenag.go.id>, diakses 22 Juli 2018.
- <https://sketsanews.com>, dikases 28 Juni 2018.
- <https://www.jambipos-online.com>. diakses pada tanggal 29 Juni 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- Makdisi, George A. *Cita Humanisme Islam, Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaissans Barat*, terj. A.Syamsu Rizal & Nur Hidayah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000.
- Masyithoh, Novita Dewi. "DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM:Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Inudonesia" dalam Jurnal Walisongo: Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 2, November 2016.
- Moesa, Ali Maschan. *NU, Agama dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*. Surabaya: Pustaka Da'i Muda, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarak, Ahmad. "Sinergisitas Ulama dan Umara dalam Perspektif Hadis; studi kritis atas Pemikiran a-Suyuti dalam kitab Ma-Rawahu al-Asafaa Fi-adani al-maj'I Ila al-Salatin", tesis pada pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Multazami, Dawam. "Sinergi Raja alim dan Think tank-nya: Karaton dan Pembentukan Tradisi Keilmuan Islam Nusantara" dalam jurnal *Dialogia*: Vol. 13 N0. 1, 2015.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Noorbani, M. Agus. "Peran Himpunan Penceramah Jambi Dalam Pembangunan Bidang Agama di Kota Jambi", Jurnal Al-Qalam Volume 21 Nomor 1 Juni 2015.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Ritaudin, M. Sidi. *Etika Politik Islam*. Jakarta: Tranmisi Media, cetakan 1, 2012.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2006.
- Sirry, Mun'im A. *Dilema Islam Dilema Demokrasi*. Bekasi: Gugus Press, 2002
- Suaedy, Ahmad dan Hermawan. *Kyai & Demokrasi: Sebuah Potret Pandangan tentang Pluralisme, Persamaan,, Negara, Pemilu, dan Partai Politik*. Jakarta: P3M kerjasama dengan The Asia Foundation, 2000.
- Tantowi, Jawahir. *Islam politik dan hukum*. Yogyakarta: madyan press Yogyakarta, 2002.
- Tirmidzi (at), Sunan. *Al-Jami' saheh*, juz 5, Beirut: Darul Fikri, tth.
- Ulum, Bahrul. *Ulama dan Politik; Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wawancara dengan AKBP Kristian Adi W, Ksubdit di Ditaskrim umum Polda Jambi, tanggal 10 Juli 2018 di Polda Jambi.
- Wawancara dengan Azrai Abbasyari, Ketua lembaga Adat Melayu Jambi, tanggal 27 Agustus 2018.
- Wawancara dengan Habib Taufik, Ketua FPI Prov. Jambi tanggal 27 Agustus 2018.
- Wawancara dengan ketua PWNU Provinsi Jambi, Aminullah Amit, tanggal 3 Juni 2018 di Jambi.
- Wawancara dengan salah satu ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Drs. Arman Syafaat tanggal 2 Juli 2018.
- Wawancara dengan Syarif Fasha, Wali Kota Jambi tanggal 27 Juni 2018 di Jambi.
- Woodhouse, Mark B. *A Preface to Philosophy*. California: Wadsworth Publishing Company, 1984.